

**PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA (BSPS) DI DESA SABRANG KECAMATAN AMBULU
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2017**

Siti Rofiqoh ¹⁾, Asmuni²⁾

¹⁾Prodi Ilmu Administrasi Negara

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan

email : sitirofiq5758@gmail.com

²⁾Prodi Ilmu Administrasi Negara

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan

email : asmuni.mumun01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan atau Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang terdiri dari 18 informan yang terbagi menjadi 2 informan kunci 4 informan pendamping dan 14 informan tambahan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu instrumen wawancara secara mendalam. Observasi dan dokumentasi dengan derajat keabsahan menggunakan triangulasi data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program BSPS berjalan cukup baik, pengorganisasian program yang dijalankan sudah sesuai SOP meskipun sebagian dari SOP tidak dapat berjalan secara maksimal. Jika dilakukan penilaian kesuksesan dari program tersebut mungkin memiliki nilai 75%. Kendala dalam pelaksanaan program yaitu kurangnya intensifnya komunikasi antara pelaksana dengan warga penerima bantuan.

Kata kunci: Kesejahteraan Masyarakat, BSPS, Implementasi Kebijakan.

ABSTRACT

This study aims to explain the implementation of the Self-help Housing Stimulant Assistance Program in Sabrang Village. This type of research is qualitative research which consists of 18 informants which are divided into 2 key informants, 4 accompanying informants and 14 additional informants. The data collection techniques used are in-depth interview instruments. Observation and documentation with a degree of validity using data triangulation. The results of the study indicate that the implementation of the BSPS program is running quite well, the organization of the program that is run is in accordance with the SOP, although some of the SOPs cannot run optimally. If an assessment of the success of the program is carried out it may have a value of 75%. The obstacle in implementing the program is the lack of intensive communication between the implementer and the beneficiaries.

Keywords: *Community Welfare, BSPS, Policy Implementation.*

1. PENDAHULUAN

Beberapa parameter kesejahteraan masyarakat adalah dengan menduduki rumah layak huni. Akan tetapi Kabupaten Jember masih mempunyai persoalan mengenai perumahan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Jember yang telah dituangkan tersebut adalah perumahan layak huni yang masih sedikit terhadap beberapa masyarakat. Guna menyelesaikan persoalan itu diperlukan rencana, kebijakan dan agenda pembangunan yang lebih tepat, terukur lewat pendekatan strategi yang menyeluruh dan dimulai dengan mengenali persoalan yang ada, sehingga dapat ditemukan tindakan-tindakan solutif lewat strategi dan kebijakan serta agenda pembangunan.

Ketidakberdayaan masyarakat yang tergolong miskin dalam menjangkau serta memenuhi kebutuhan rumah layak huni disebabkan oleh minimnya pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Dari hal tersebut, dikhawatirkan nantinya akan menyebabkan adanya ketidakberfungsian sosial sampai dengan keterlantaran individu sebagai anggota keluarga yang ada didalamnya. Dengan memiliki rumah, secara fisik akan memberikan manfaat terlindunginya individu tersebut dari kondisi cuaca alam seperti panas matahari, hujan, dan serangan hewan yang mengancam nyawa. Secara mental terpenuhinya kebutuhan rumah akan mengakibatkan individu atau keluarga dapat memberikan rasa nyaman, bisa sebagai sarana beristirahat, dan lebih terfokus dalam melakukan pekerjaan diluar rumah. Sedangkan untuk fungsi sosial rumah menjadi sarana sebagai proses pembinaan keluarga dalam segi jasmani, rohani, pemberian nilai sosial dan pembentukan karakter setiap anggota dalam keluarga. (Wanda, 2017:3).

Adanya program BSPS merupakan rangkaian dari kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat. Kementerian Perumahan Rakyat telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan sejak tahun 2009 sampai 2012. Pada tahun 2010 Kementerian Perumahan Rakyat telah meluncurkan kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) dengan pendekatan Tridaya (manusia, lingkungan, ekonomi), kesesuaian dengan tata ruang, penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), dan keterpaduan dengan sektor lain. Kegiatan ini didukung dengan kegiatan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa penyediaan stimulan peningkatan kualitas (PK) dan pembangunan baru (PB) bagi rumah tangga kumuh, kegiatan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), dan disediakan skema pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diatur dalam Permenpera Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bantuan stimulan adalah fasilitasi pemerintah

berupa sejumlah dana yang diberikan kepada MBR penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya.

Berdasarkan data yang diperoleh, usulan program ini sejumlah 150 calon penerima program. Kemudian dari semua usulan sejumlah 150 orang disetujui $\frac{1}{3}$ dari jumlah usulan. Dari 1 dusun yang tidak dapat mendapatkan implementasi dari program ini, dikarenakan tanah yang ditempati Dusun tersebut status kepemilikan bukanlah milik sendiri melainkan Perhutani sehingga tidak dapat mendapatkan alokasi dalam program ini.

Perumusan suatu kebijakan hingga pada tahap pelaksanaan operasionalnya yang berbentuk program, proyek, ataupun kegiatan diharapkan dapat mencapai tujuan atau sasaran khusus yang ingin dicapai. Hal demikian dilakukan guna melihat kesesuaian kebijakan atau program itu sendiri sudah sesuai dengan tujuan, dapat memecahkan masalah, serta dapat memenuhi kebutuhan di dalam masyarakat ataupun sebaliknya. Pada tahap pelaksanaan kebijakan melalui program yang diberikan dalam pelaksanaannya harus tetap dilakukan pengkajian dan analisis masalah yang hadir di lapangan secara berkelanjutan sebagai proses ilmiah dari terciptanya suatu kebijakan ataupun program itu sendiri. Pendekatan dalam dimensi pemberdayaan, penguatan peran pendampingan sosial, serta pemahaman dan pemaknaan mendalam tentang unsur partisipatif, merupakan pendekatan teori yang bisa digunakan untuk melihat lebih dalam terhadap hasil (*output*) program itu sendiri. Dari berbagai penjelasan tersebut peneliti penting sekali untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2017.

Berdasarkan uraian tersebut penulis terpacu melaksanakan penelitian dengan judul : “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2017**”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kesejahteraan Sosial

Menurut dasar kata atau asal-usulnya, kesejahteraan bermula dari kata “sejahtera” yang memiliki definisi atas bahasa Sanskerta “*cetera*” yang memiliki arti “payung”. Berdasarkan definisi kata tersebut kesejahteraan yang dimaksud dalam “*cetera*” yaitu orang yang sejahtera, orang yang di masa hidupnya lolos atas kebodohan, kemiskinan, kekhawatiran, dan ketakutan yang kelak hidupnya akan sejahtera nan damai. Kesejahteraan sosial merupakan metode yang terukur berdasarkan pelayanan sosial serta instansi yang diprogram guna mendukung masyarakat untuk memenuhi kriteria kehidupannya. (Kahn dalam Fahrudin, 2014:23).

Kesejahteraan yang berarti pengkajian mengenai perencanaan, regulasi dan petugas instansi yang memfokuskan pada implementasi layanan sosial terhadap masyarakat. Selain itu kesejahteraan sosial memiliki peranan penting pada disiplin akademik. (Fahrudin, 2014:10).

Dimana kesejahteraan sosial memiliki tujuan :

1. Guna menggapai kehidupan yang sejahtera demi terciptanya kriteria pokok kehidupan misalnya pangan, sandang, perumahan, kesehatan serta hubungan masyarakat yang rukun pada alam sekitar.
2. Guna terciptanya suatu adaptasi yang baik pada masyarakat serta pada alam sekitarnya. Seperti menganalisis serta meninjau metode dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tujuan pokok dari kesejahteraan sosial yaitu terciptanya keadaan sejahtera yang bisa diperkirakan pada tercapainya suatu kebutuhan pokok masyarakat misalnya pangan, sandang, dan perumahan yang menjadi parameter minimum kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan adaptasi atas lingkungannya. Kesejahteraan sosial juga bertujuan untuk meredakan dan melenyapkan tekanan-tekanan yang diakibatkan perubahan sosial ekonomi, dan menjauhi dampak negatif supaya dapat mencapai keadaan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Friedlander dan Ape dalam Fahrudin, 2014:12).

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan piranti teknis dan logis guna menuntaskan persoalan. (Shore dan Wright dalam Marzali 2012:20). Disisi lain Kebijakan yaitu asas-asas yang mengelompokkan langkah-langkah untuk mengarahkan menuju cita-cita. (Titmuss dalam Suharto 2012:7). Selain itu Kebijakan merupakan suatu ketentuan guna menjalankan atau tidaknya sesuatu, kebijakan publik secara global adalah langkah-langkah bersama guna menyelesaikan persoalan sosial. Akan tetapi kebijakan dapat diartikan atas ketentuan bahwa persoalan sosial akan bisa diselesaikan dengan konsep kebijakan yang telah dibuat oleh karena itu tidak membutuhkan langkah-langkah tertentu.

Sesungguhnya sejumlah agenda dapat dikembangkan guna merespon tujuan kebijakan yang sama, dan mendatangkan suatu perubahan dalam lingkungan kebijakan, suatu perubahan yang dapat didefinisikan sebagai akibat atas sebuah program. Dalam rangka tercapainya keserasian antara tujuan dan target kebijakan dengan realita di lapangan, (Fahmi dalam Amini, 2019:18) mengutarakan bahwa terdapat sejumlah faktor yang bisa memunculkan kegagalan dalam implementasi atau kebijaksanaan, yaitu:

1. Isi Kebijaksanaan
2. Sosialisasi
3. Dukungan
4. Pembagian Potensi

2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari aktivitas pengorganisasian interpretasi dan aplikasi. (Jones dalam Nirwanasari, 2020:22). Berdasarkan implementasi kebijakan Jones tersebut dapat dijabarkan 3 macam aktivitasnya, yaitu:

1. Pengorganisasian

Dalam hal ini, program harus memiliki struktur organisasi atau birokrasi yang jelas serta teratur. Indikatornya yaitu:

- a) Struktur Organisasi pelaksana, kesesuaian pekerjaan yang dilakukan, serta tugas pokok dan fungsinya.
- b) Sumber daya manusia dalam organisasi.
- c) Perlengkapan, alat kerja, sarana dan prasarana, serta biaya operasional.

2. Interpretasi

Dalam hal ini, program kebijakan harus memiliki petunjuk teknis dan pelaksanaan yang dapat dijadikan pedoman oleh pelaksana program. Agar program dan tujuannya dapat tercapai dengan optimal. Indikatornya yaitu:

- a) Komunikasi antar pelaksana dan masyarakat.
- b) Kesesuaian pelaksanaan dan peraturan.
- c) Kesesuaian petunjuk pelaksanaan dengan petunjuk teknis.

3. Penerapan atau Aplikasi

Adapun indikator penerapan supaya dapat tercapai secara optimal.

- a) Prosedur kerja dan kejelasan SOP.
- b) Program kerja dan kejelasan program kerja.

2.4 Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana terdapat kekurangan perihial yang biasa untuk dimiliki yang sering disebut dengan istilah pangan, sandang, dan papan, perihial tersebut sangat berkaitan erat dengan kualitas hidup. Mereka disebut berada dibawah garis kemiskinan jika pendapatannya tidak cukup guna memenuhi kebutuhan pokok, yakni pangan, sandang, dan papan. (Anwar dan Adang, 2013:260).

Kebutuhan pokok bisa diartikan dalam suatu paket barang dan jasa yang dibutuhkan setiap orang guna dapat hidup secara manusiawi yang terdiri atas komposisi pangan bergizi cukup, kebutuhan air higienis, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan yang paling pokok yaitu tempat tinggal. Garis kemiskinan yang ditentukan oleh batas-batas minimum pendapatan guna memenuhi kebutuhan pokok biasanya dipengaruhi oleh :

1. Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan.
2. Posisi manusia dalam lingkungan sekitarnya.
3. Kebutuhan obyektif manusia biasa hidup secara manusiawi

Emil dalam Syani (2012) berpendapat bahwa untuk memperbaiki nasib mereka mesti ada campur tangan dan penyertaan aktif membantu mereka keluar

dari bawah garis kemiskinan tanpa bantuan pemerintah, maka mereka akan semakin tidak mampu merebut bagian yang lebih layak dari pendapatan nasional bagaimana tidak demikian, betapa banyak rakyat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan itu belum lagi mau meningkatkan pendapatan, baru akan mulai saja sudah tersandung dengan harga yang lebih cepat melambung tinggi.

2.5 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Adapun maksud dan tujuan dari program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) adalah :

- 1) Maksud Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya adalah mendorong MBR membangun sendiri rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan aman yang dilaksanakan dengan cara :
 - a. Mewujudkan kegiatan berbasis komunitas.
 - b. Mendampingi dan memberdayakan dalam rangka peningkatan kapasitas keswadayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
 - c. Mengoptimalkan sumber daya lokal untuk kesejahteraan yang berkelanjutan.
- 2) Tujuan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya adalah :
 - a. Menyediakan instrumen penyelenggaraan perumahan swadaya yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung, memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk membangun rumah dan lingkungannya secara swadaya.
 - b. Menyediakan program dan kegiatan yang dapat membantu mendorong, memfasilitasi dan mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan yang dilakukan secara swadaya.
 - c. Mempercepat tersedianya rumah layak huni dalam lingkungan sehat, tertib aman dan nyaman dengan cara terjangkau.

Adapun Sasaran fungsional kegiatan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya adalah terselenggaranya pemberian dukungan, dorongan, fasilitasi bagi pembangunan dan pengembangan perumahan swadaya secara tertib, tepat sasaran, tepat penggunaan, dan tepat waktu serta berkelanjutan. Adapun Sasaran operasional kegiatan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya adalah :

- 1) Meningkatnya kapasitas dan kemampuan kelompok masyarakat dalam rangka pembangunan perumahan swadaya.
- 2) Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan pemukiman.
- 3) Meningkatnya jumlah rumah layak huni dengan cara yang terjangkau, bagi MBR yang membangun rumah atau meningkatkan kualitas rumahnya secara swadaya.

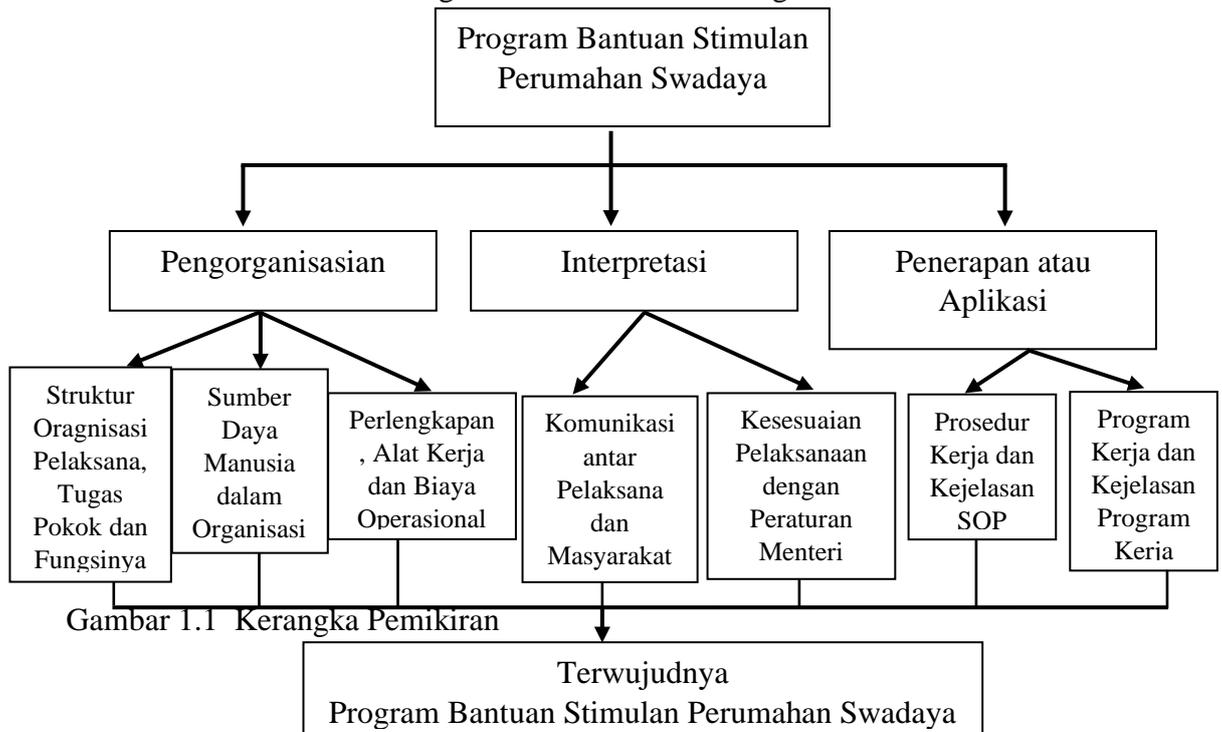
2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. (Sugiyono, 2012). Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk memberikan

gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya.

Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dengan adanya permasalahan-permasalahan kemiskinan yang membuat masyarakat mempunyai rumah yang tidak layak huni. Penyebab kemiskinan terjadi yaitu karena sumber mata pencaharian yang dimiliki masyarakat tidak ada yang cukup menjanjikan. Sumber mata pencaharian rata-rata masyarakat yang adalah pada bidang pertanian yang hasilnya juga masih tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini merupakan perpaduan dari teori Charles O. Jones dan George C. Edward adalah sebagai berikut :



3. METODE PENELITIAN

Pendekatan metode penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini penentuan informan peneliti menggunakan teknik *snowball* sampling yang meliputi perangkat desa dan masyarakat Sabrang. Penulis menjadikan Kepala Desa Sabrang dan juga penanggung jawab Program BSPS sebagai informan kunci. Karena penulis merasa dua orang tersebut yang memahami kurang lebih implementasi dari program tersebut. Kemudian setelah itu, peneliti menelusuri informasi lebih dalam seputar pelaksanaan program di Desa Sabrang yaitu kepada pihak LPM Desa Sabrang, dan berdasarkan petunjuk dan rekomendasi dari pihak LPM peneliti mendapatkan rekomendasi informan pendamping yaitu kepada tenaga pendamping masyarakat penerima bantuan serta informan tambahan yaitu sejumlah penerima bantuan di 4 Dusun yaitu Krajan, Kebonsari, Tegalrejo dan Jatirejo. Dalam penelitian ini ada beberapa cara yang digunakan untuk

pengumpulan data yakni Observasi, Wawancara secara mendalam dan Dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi data atau sumber, triangulasi metode wawancara, dan triangulasi teori untuk memperoleh data atau informasi tambahan yang dapat dijadikan data pembandingan.

4. PEMBAHASAN

Penelitian menggunakan Teori Jones yang terdiri dari 3 poin, diantaranya: Pengorganisasian, Interpretasi dan Penerapan atau aplikasi. Berikut merupakan hasil penelitian yang peneliti lakukan melalui pengumpulan data wawancara secara mendalam yang telah direduksi.

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Pengorganisasian

Hasil wawancara dan data yang diperoleh terkait struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dari pelaksana BSPS di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu, yaitu struktur organisasinya dimulai dari tingkat pusat hingga ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai penerima bantuan. Pada prakteknya para pelaksana masih belum mampu mengerjakan tugasnya. Pelaksana hanya mengerjakan tugasnya yang bersifat teknis saja mengumpulkan data masyarakat calon penerima dan memfoto rumah warga calon penerima namun seperti yang diketahui data tersebut juga hanya diambil di Kantor Kepala Desa.

Hasil wawancara dan data yang diperoleh terkait sumber daya manusia yang terdapat dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para pelaksana yang ada masih belum memadai karena masih belum mampu mengerjakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seperti syarat administratif warga penerima dikerjakan oleh satu Tenaga Pendamping yang bisa mengoperasikan komputer dan 3 yang lain lebih fokus ke lapangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa SDM belum cukup memadai untuk dapat menjalankan program secara optimal.

Hasil wawancara dan data yang diperoleh terkait pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang tidak ada perlengkapan, alat kerja maupun biaya operasional yang diberikan. Masyarakat yang ada secara swadaya membantu dalam pelaksanaan program dan dalam pengerjaan rumah warga yang menerima bantuan. Bantuan ini memang dikerjakan secara swadaya masyarakat dan pemerintah setempat dan memang dalam pelaksanaan tidak ada perlengkapan, alat kerja, dan biaya operasional bagi para penerima bantuan mereka menggunakan dananya sendiri guna membeli perlengkapan dan alat kerja yang mereka butuhkan dalam pembangunan rumahnya.

4.1.2 Interpretasi

Hasil wawancara dan data yang diperoleh terkait komunikasi antar pelaksana dan masyarakat yaitu sosialisasi mengenai program Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya di Desa Sabrang sudah dilakukan. Sosialisasi yang dilakukan ada dua yaitu sosialisasi desa yang dilakukan di balai desa dan sosialisasi langsung yang pelaksana langsung mendatangi rumah warga untuk mendata. Kepala Desa yang selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Tenaga Pendamping Masyarakat yang ada tentang pelaksanaan program bantuan dan sejauhmana perkembangannya.

Sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa dan pelaksana belum secara menyeluruh kepada masyarakat karena hanya sebagian masyarakat yang tahu tentang adanya bantuan ini. Dan yang di sosialisasikan pun hanya kepada warga yang dianggap berhak menerima bantuan karena sosialisasi dilakukan sekaligus mendata masyarakat yang ingin diajukan untuk menjadi penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, bahwa sudah dilaksanakan sosialisasi mengenai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang. Penanggung jawab program mengatakan sosialisasi tentang program bantuan ini sudah dilaksanakan. Sosialisasi program di Desa Sabrang dilakukan dengan sosialisasi desa. Berdasarkan informasi yang diterima peneliti bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang memang masih kurang untuk disosialisasikan. Karena masih banyak warga yang belum mengetahui tentang adanya program bantuan ini.

Satu diantara semua penerima bantuan menyatakan bahwa tidak dilakukan sosialisasi secara menyeluruh dan kebanyakan masyarakat hanya mendengar saja bahwa akan ada bantuan, pendataan dan sosialisasi dilakukan hanya kepada warga yang dianggap memang butuh untuk pembangunan rumahnya. Dengan demikian, mengenai komunikasi yang dilakukan dalam sosialisasi masih sangat kurang kepada masyarakat karena tidak semua masyarakat mengetahui tentang Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Penerima bantuan yang ada di Desa Sabrang sudah tepat sasaran. Namun karena bantuannya terbatas, masih banyak terdapat warga yang memiliki rumah tidak layak huni yang belum terbantu.

Hasil wawancara dan data yang diperoleh terkait kesesuaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pada pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu tidak begitu sesuai dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan yang ada. Persyaratan administrasi yang dimasukkan sudah memenuhi syarat dan lolos verifikasi di pusat. Adapun masalah petunjuk, pelaksana hanya mendengar tanpa benar-benar paham tentang petunjuknya. Tenaga pendamping masyarakat dan juga pelaksana lainnya hanya sekedar memberikan dana bantuan tanpa betul-betul membina masyarakatnya secara langsung di lapangan. Dari hasil wawancara beberapa informan tersebut diketahui bahwa di Desa Sabrang, Petunjuk Pelaksanaan yang dilakukan belum sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan.

Terkait masalah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang disampaikan secara langsung dihadapan para pelaksana dan penerima bantuan

namun dinilai peneliti masih kurang efektif karena para pelaksana mendengarkan sekilas saja. Seperti yang dikatakan Tenaga Pendamping Masyarakat di Desa Sabrang yang mengatakan baik pelaksana dan penerima bantuan masih kurang paham betul tentang petunjuk yang ada karena petunjuknya hanya didengarkan pada saat sosialisasi saja.

Menurut peneliti akan lebih baik jika petunjuk tersebut diberikan salinannya untuk dipelajari oleh masing-masing pelaksana agar mereka memahami betul apa yang harus mereka kerjakan sesuai dengan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Hal tersebut dianggap penting agar para pelaksana tidak mempunyai interpretasi yang berbeda-beda diantara para pelaksana dan penerima bantuan.

4.1.3 Penerapan atau Aplikasi

Hasil wawancara dan data yang diperoleh terkait prosedur kerja dan kejelasan dari SOP yaitu prosedur kerja yang ada di Desa Sabrang kurang jelas. Semua kegiatan yang dilakukan sudah berdasarkan prosedur kerja yang ada. Namun prosedur yang diberikan kepada pelaksana yaitu Tenaga Pendamping Masyarakat tidak begitu jelas. Maka dari itu dalam pelaksanaan Tenaga Pendamping Masyarakat berpatokan pada program yang pernah dikerjakan dulu.

Prosedur-prosedur yang digunakan dalam bantuan ini dianggap sama saja oleh penerima bantuan yaitu dengan mengumpulkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan menunggu bantuan datang. Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Pendamping Masyarakat hanya menunggu instruksi yang diperintahkan dari pemerintah yang lebih di atasnya. Penerima tidak mengetahui masalah prosedurnya dengan jelas. Penerima hanya mengikuti instruksi dari pelaksana dan tinggal menunggu saja nama keluar dan bantuan cair, tidak ada prosedur khusus yang diberikan. Mereka hanya disuruh mengumpulkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. setelah dan bantuannya cair, mereka juga diberi kebebasan untuk mebnagun rumahnya kapan saja sesuai dengan kemauan penerima.

Dalam penerapan atau aplikasi harus ada prosedur kerja yang jelas sehingga program bisa berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan dan tidak berbenturan dengan program lainnya. Hal ini sangat diperlukan dalam sebuah program, prosedur kerja yang jelas bisa membantu pelaksana program kebijakan menjalankan dan mengelola suatu pekerjaan secara baik. Itu akan membuat implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang berjalan dengan baik.

Terkait tidak jelasnya prosedur dalam bekerja, dalam melaksanakan tugas Tenaga Pendamping Masyarakat hanya menunggu instruksi yang diperintahkan. Dengan begitu, akan membuat pelaksanaan program bantuan di Desa Sabrang masih kurang tercapai karena Standar Operasional Prosedurnya tidak jelas diberikan kepada para pelaksana. Penerima bantuan pun tidak begitu paham tentang prosedur pelaksanaan bantuan stimulan ini. Mereka hanya mengikuti

arahan dari pelaksana program dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan serta menunggu dana bantuannya cair.

Dari hasil pembahasan tersebut diketahui bahwa penerima tidak mengetahui masalah prosedurnya dengan jelas. Penerima hanya mengikuti instruksi dari pelaksana. Dengan tidak adanya Standar Operasional Prosedur yang jelas di Desa Sabrang maka pelaksanaannya pun tidak akan jelas. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang tidak jelas tersebut hanya disampaikan kepada pelaksana secara lisan akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan program. Hingga pada akhirnya semua akan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu pekerjaan yang dilakukan sehingga tujuan dari program ini tidak akan tercapai dengan baik.

4.2 Analisis Temuan Penelitian

Sesuai dengan hasil penelitian yang sudah diuraikan diatas penulis menggunakan teori dari Jones mengenai implementasi kebijakan dengan indikator Pengorganisasian, Interpretasi dan Penerapan. Dari hasil penelitian tersebut penulis akan meringkas pembahasan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dibuat. Sehingga pembahasan akan dapat menjawab apa yang menjadi rumusan masalah yang ditentukan oleh penulis.

4.2.1 Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Sabrang

Sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dituliskan diatas, implementasi program tersebut berjalan cukup baik namun belum dapat membuahkan hasil yang maksimal. Program tersebut bisa dikatakan selesai namun klasifikasinya hanya sebatas cukup, tidak buruk namun masih banyak yang harus diperbarui lagi dalam penerapan program tersebut.

Namun secara keseluruhan pelaksanaan program dapat berjalan cukup baik. Implementasi program tersebut tidak hanya terkait rumah yang tidak layak huni. Namun dalam realitanya juga program tersebut dapat membangun MCK umum, sehingga bagi warga yang selama ini melakukan segala kebersihan di sungai sudah terminimalisir dengan adanya pembangunan MCK umum tersebut.

Sesuai dengan hasil penelitian implementasi program BSPS berjalan cukup baik, hal tersebut ditunjukkan dengan hasil wawancara bahwa pengorganisasian program yang dijalankan sudah sesuai SOP meskipun sebagian dari SOP tidak dapat berjalan secara maksimal hal tersebut merupakan bagian dari kendala yang dapat kita jelaskan pada keterangan selanjutnya. Namun dari keseluruhan SOP tersebut banyak yang terselenggara dengan cukup baik. Selanjutnya komunikasi yang dilakukan antara pelaksana dengan warga penerima bantuan cukup baik meskipun hal ini juga yang merupakan penyumbang kendala paling besar, namun program tetap dapat berjalan dan terselesaikan walaupun kurang optimal.

Terkait mengenai penerapan prosedur kerja dan kejelasan SOP sudah baik, dari keseluruhan SOP mungkin hanya 10% yang menjadi kendala, dan adanya kendala tersebut bukan berarti SOP tersebut tidak dijalankan. SOP tetap berjalan

melainkan tidak maksimal dan ketika SOP tidak dijalankan secara maksimal berarti terdapat kendala pada implementasi program tersebut.

Berdasarkan pembahasan diatas yang mengacu pada hasil penelitian implementasi program BSPS dapat berjalan cukup baik. Jika dilakukan penilaian kesuksesan dari program tersebut mungkin memiliki nilai 75%. Karena memang banyak harus dibenahi dan diperbarui dalam implementasi program tersebut. Untuk kendala dalam implementasi program dapat dijelaskan lebih detail pada pembahasan selanjutnya.

4.2.2 Kendala pada saat Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Sabrang

Kendala pelaksanaan program tersebut yaitu komunikasi antara pelaksana dengan program penerima yang kurang baik. Sehingga menimbulkan interpretasi yang berlebih bagi warga penerima program. Yang menyebabkan warga penerima merasa sedikit kecewa dengan realisasi program tersebut. Warga penerima berfikir bahwa program tersebut turun untuk membangun rumah secara total untuk yang lebih baik. Namun realitanya bantuan tersebut turun berupa material bangunan dan uang untuk ongkos tukang. Tetapi memang pada dasarnya program tersebut hanya bertujuan untuk pemugaran atau renovasi bagi rumah yang tidak layak huni ada pun yang membangun mulai nol, tetapi bantuan material disesuaikan dengan kebutuhan. Dari interpretasi yang berlebih warga penerima tersebut diantaranya juga perlengkapan dan peralatan kerja, mereka menganggap semua akan diterima bersamaan dengan program tersebut, tetapi perlengkapan dan peralatan kerja tersebut menggunakan seadanya milik warga. Yang menjadi kendala selanjutnya yaitu sosialisasi yang kurang merata yang menyebabkan tenaga pendamping dan warga penerima kurang memahami maksud dan tujuan dari adanya program tersebut.

Bagi tenaga pendamping program BSPS dikerjakan berdasarkan program yang sudah berlalu yang hampir sama. Karena memang tenaga pendamping kurang memahami SOP dari program tersebut. Serta bagi warga penerima hanya sebagian yang dilakukan sosialisasi dan yang tidak memahami tentang program tersebut mereka hanya mengetahui untuk dimintai dokumen administratif bahwa akan ada bantuan. Namun mereka tidak memahami secara jelas program tersebut maksud dan tujuan serta prosedur implementasinya seperti apa, hal tersebut sesuai yang sudah dijelaskan diatas bahwa sebagian sasaran menganggap ada yang tetangganya ada yang kondisi rumahnya hampir sama namun tidak mendapatkan bantuan program tersebut.

Berdasarkan keterangan diatas yang menjadi kendala yaitu kurangnya intensifnya komunikasi antara pelaksana dengan warga penerima bantuan, andai saja sosialisasi tersebut bisa dilakukan secara maksimal warga penerima bantuan akan memahami maksud dan tujuan program dan tidak menimbulkan interpretasi berlebih bagi warga penerima.

4.2.3 Dampak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi masyarakat penerima Desa Sabrang

Pengaruh program BSPS terhadap masyarakat atau bagi warga penerima bantuan. Dengan implementasi program tersebut masyarakat memiliki respon yang positif atas terealisasinya program. Hal tersebut didukung dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap warga penerima bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat rasa program kerjanya juga sangat jelas karena memang tujuannya adalah membantu mendorong masyarakat menjadikan rumah dan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kepala Desa Sabrang bahwa program tersebut sangat membantu, meskipun program tidak dapat berjalan secara maksimal paling tidak program tersebut sudah meringankan beban masyarakat untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal yang lebih baik.

Terkait mengenai rumah yang layak huni dengan kesejahteraan masyarakat yaitu mengacu pada pendapat Wanda pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa rumah memiliki fungsi yang lebih luas bagi setiap individu atau manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Dengan memiliki rumah, secara fisik akan memberikan manfaat terlindunginya individu tersebut dari kondisi cuaca alam seperti panas matahari, hujan, dan serangan hewan yang mengancam nyawa. Kemudian secara mental terpenuhinya kebutuhan rumah akan mengakibatkan individu atau keluarga dapat memberikan rasa nyaman, bisa sebagai sarana beristirahat, dan lebih terfokus dalam melakukan pekerjaan diluar rumah. Sedangkan untuk fungsi sosial rumah menjadi sarana sebagai proses pembinaan keluarga dalam segi jasmani, rohani, pemberian nilai sosial dan pembentukan karakter setiap anggota dalam keluarga.

Dengan rumah yang layak huni paling tidak masyarakat merasa aman dan memiliki ketentraman hati dan bisa berfokus untuk melakukan kegiatan diluar rumah, ketika masyarakat merasa aman dan nyaman mereka akan merasakan ketentraman yang dapat membuat hidup mereka lebih sejahtera.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 1 Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa implementasi program BSPS berjalan cukup baik, hal tersebut ditunjukkan dengan hasil wawancara bahwa pengorganisasian program yang dijalankan sudah sesuai SOP meskipun sebagian dari SOP tidak dapat berjalan secara maksimal. Jika dilakukan penilaian kesuksesan dari program tersebut mungkin memiliki nilai 75%.

Karena memang banyak harus dibenahi dan diperbarui dalam implementasi program tersebut.

- 2 Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa yang menjadi kendala yaitu kurangnya intensifnya komunikasi antara pelaksana dengan warga penerima bantuan, andai saja sosialisasi tersebut bisa dilakukan secara maksimal warga penerima bantuan akan memahami maksud dan tujuan program dan tidak menimbulkan interpretasi berlebih bagi warga penerima.
- 3 Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa Dampak Implementasi program tersebut masyarakat memiliki respon yang positif atas terealisasinya program. Hal tersebut didukung dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap warga penerima bantuan. Program tersebut sangat membantu, meskipun program tidak dapat berjalan secara maksimal paling tidak program tersebut sudah meringankan beban masyarakat untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal yang lebih baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian dalam penelitian ini, sehingga dapat dituliskan sejumlah seperti dibawah ini :

1. Untuk program selanjutnya usahakan dapat merencanakan program dengan baik supaya dapat membangun komunikasi yang lebih baik dengan sinergitas yang baik dapat mengoptimalkan realisasi program.
2. Untuk program selanjutnya usahakan dapat memilih tenaga yang terampil dan memahami komputer sehingga program berjalan secara lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, Riska. 2019. *Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
- Anwar, Yesmil, dan Adang. 2013. *Sosiologi untuk Universitas*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Fahrudin, Adi. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Marzali, Amri. 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Perenada Media Group
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Suhendi, Ahmad, Mochammad Syawie, *Pemberdayaan Keluarga Miskin Berbasis Komunitas melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Studi di Desa Jambu Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat)*, Sosiokonsepsia Vol.17, No. 03 tahun 2012

Wanda, Adhe Setyawan. 2017. *Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsp) Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun 2014*. Jurnal FISIP UNEJ <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/85801>